LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NGANJUK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan LKjIP perpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai sebagai pertanggungjawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten NganjukTahun 2025 kepada Bupati Nganjuk. Kami sadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja ini masih terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, 6 Februari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN NGANJUK,



NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19721208 199803 1 006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Gambaran Umum 4

B. Landasan Hukum 5

C. Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi 6

D. Isu-isu Strategis 16

E. Sistematika Penulisan 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 19

A. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja 19

B. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34

A. Capaian Kinerja 34

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 35

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 44

A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 51

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan) 54

A.5 Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penerus kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 57

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penguna Sumber Daya 62

A.7 Analis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pecapaian Kinerja 63

B. Realisasi Anggaran 78

BAB IV PENUTUP 88

BAB I

PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum/Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu peyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka integrasi perwujudan Misi Kabupaten Nganjuk.

Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrument dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP tahun 2025 ini meyajikan 2 pertanggungjawaban kinerja yang berdasarkan renstra revieu 2024-2026 dan renstra 2025-2029 yang menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Terkait dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan mengukur hasil-hasilnya baik secara fisik maupun finansial. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem AKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2015). Berdasarkan Inpres No: 7/1999, instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas perencanaan yang telah ditetapkan. Inpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi, Kebijakan/Program dan indikator kinerja), mengukur keberhasilan organisasinya melalui seperangkat indikator kinerja yang ditetapkannya sendiri, dan melaporkan akuntabilitas kinerjanya.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Nganjuk Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegarayang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

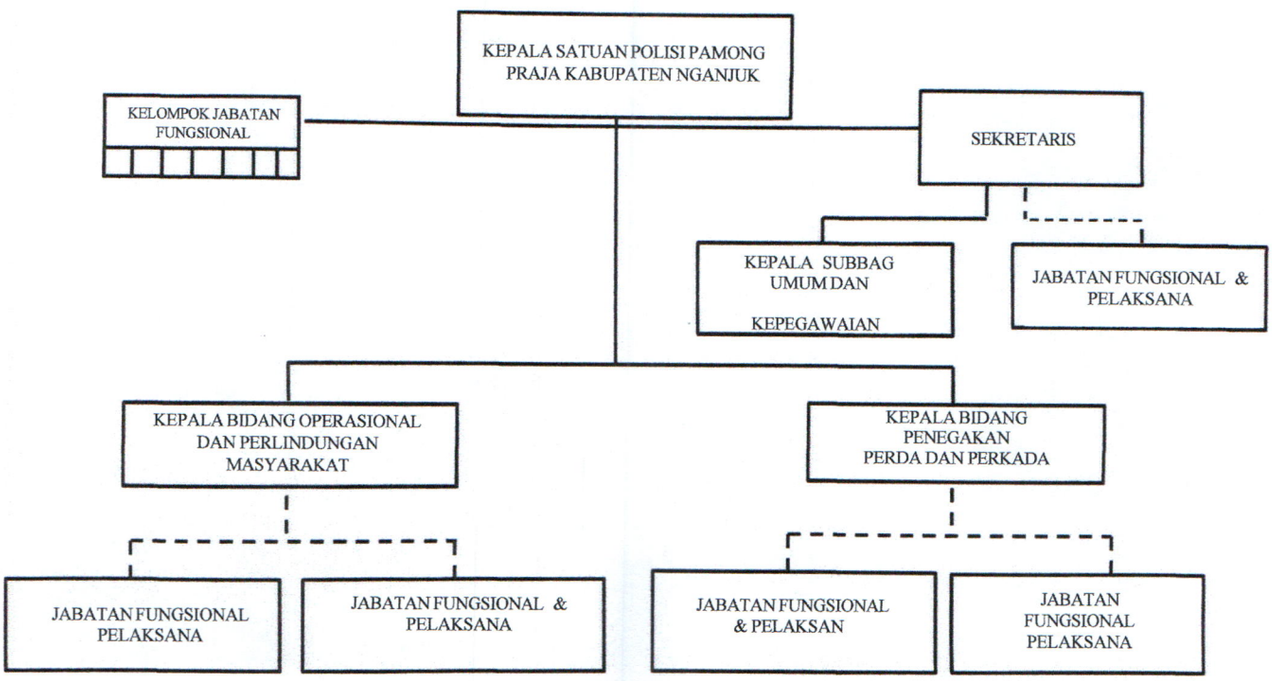
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukanan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026

c. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

SUSUNAN ORGANISASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK



Dari Stuktur Organisasi tersebut diatas dapat diuraikan Status dan Kedudukan serta Jumlah Personil di Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025. Dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk pada bulan April 2025 memiliki personil sebanyak 51 Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Kontrak sebanyak 26, dengan kualifikasi yang terbagi pada tabel sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebanyak 51 orang dan Tenaga Kontrak 26 orang , yang terbagi :

1. Pejabat Struktural : 5 Orang
2. Perencana Ahli Muda : 1 Orang
3. Pol PP Ahli Muda : 1 Orang
4. Pejabat Fungsional : 3 Orang
5. Staf Administrasi : 16 Orang
6. Pranata Pasukan Dalam : 24 Orang
7. Pranata Perlindungan Masyarakat : 1 Orang
8. Tenaga Kontrak : 26 Orang

   Jumlah : 76 Orang

Kualifikasi Pendidikan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk, yaitu :

1) Pendidikan Formal

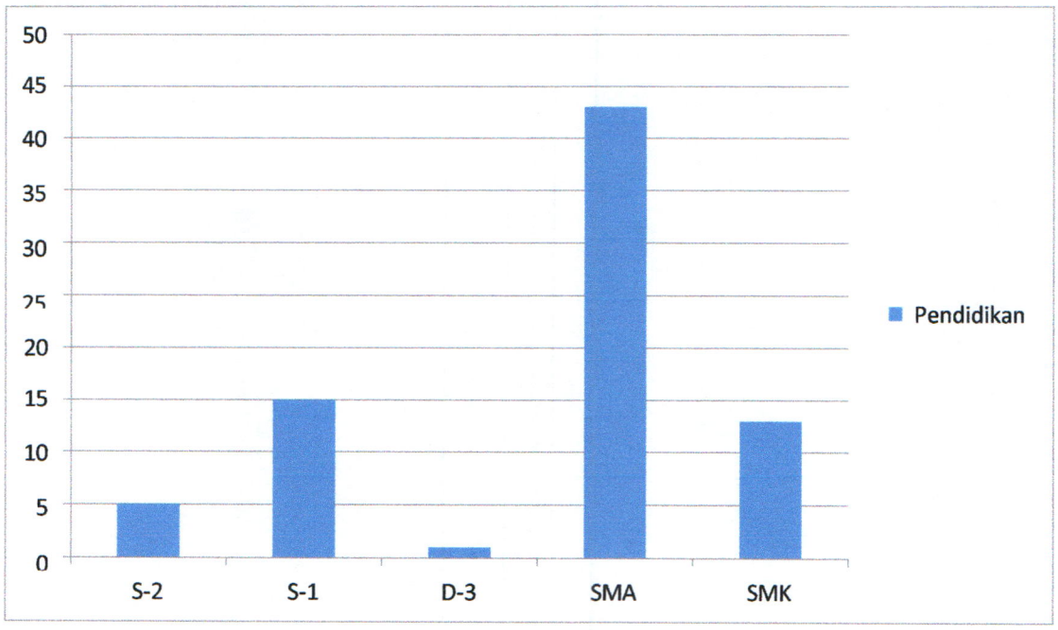
S-2	: 5	orang
S-1	: 15	orang
SMA	: 43	orang
SMK	: 13	orang
D3	: 1	orang

2) Golongan

• Golongan I	: -	orang
• Golongan II	: 13	orang
• Golongan III	: 26	orang
• Golongan IV	: 4	orang

Grafik 2.b.1

Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berdasarkan Pendidikan s/d April 2025



Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Jumlah pegawai sebagaimana dimaksud pada tabel 2.1 diatas didistribusikan ke dalam Sekretariat sebanyak 10 orang, Bidang Penegakan Peraturan Daerah 5 orang, Bidang Operasional dan Pelindungan Masyarakat 30 orang.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang sesuai Jabatan/Eselon – Laki- laki dan Perempuan s/d April 2025

No	Bidang	Jabatan/Esselon											
		II		III		IV		Fungsional		Pelaksana		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Sekretariat	1	-	1	-	-	1	-	2	4	1	6	4
2.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	5	-
4.	Bidang Operasional dan Linmas	-	-	1	-	-	-	4	-	26	-	36	-
JUMLAH		**1**	**-**	**3**	**-**	**-**		**4**	**2**	**34**	**1**	**47**	**4**

Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

s/d April 2025

NO.	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN								JUMLAH	
		S2		S1		SMA		SMK			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Sekretariat	1	1	2	3	1	-	2	-	6	4
2.	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	1	-	3	-	1	-	-	-	5	-
4.	Bidang Operasional dan Linmas	2	-	4	-	26	-	4	-	36	-
JUMLAH		**4**	**1**	**9**	**3**	**22**	**-**	**6**	**-**	**47**	**4**

Sumber data DUK Perangkat Daerah s/d Bulan April 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa distribusi pegawai untuk **Sekretariat** sebanyak 10 orang, sebanyak 7 orang diantaranya berpendidikan S2/S1, sisanya sebanyak 3 orang berpendidikan SMA/SMK sementara untuk **Bidang Penegakan Peraturan Daerah** dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang, 4 orang diantaranya berpendidikan S1/S2, sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA, sedangkan **Bidang Trantibum Linmas** dengan jumlah pegawai 36 orang PNS berpendidikan SLTA 30 orang, berpendidikan S1/S2 6 Orang

, tenaga honorer 26 orang berpendidikan SLTA, serta. Untuk **Kelompok Jabatan Fungsional** dengan jumlah Pegawai sebanyak 5 orang, 3 orang /S1/S2, sisanya sebanyak 2 orang berpendidikan SLTA

A. Tugas Dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk pada lampiran XXIV adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok Satpol PP**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. **Fungsi Satuan Polisi**

Satuan Polisi Pamongg Praja Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan, kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,penyelenggaraan perlindungan masyarakat ;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
d. pengawasan terhadap masyarakat,aparatur atau badan hokum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketetelaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;dan
g. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Susunan lembaga yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, pengawasan, ketatausahaan dan membagi tugas kegiatan bawahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencaan,keuangan,urusan tata usaha,perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara dan barang milik daerah;
4. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur;
5. Pengelolaan Urusan Kepegawaian;
6. Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Anggaran
7. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendapatan daerah kewengan perangkat daerah;
8. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik Negara dan barang milik daerah;
9. Pembinaan dan Koordinasi urusan kepegawaian
10. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaiatan dengan tugasnya.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsiapan
3. Melaksanakan Urusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik Negara dan barang milik daerah;
5. Melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. Melaksanakan Sosialisasi peraturan perundang- undangan dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan,pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan ;
2. Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten ;
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum ;
4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia ;
5. Penyusunan standard Operasional prosedur (SOP) ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat ;
6. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dn peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkaitan dengan tugasnya

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
3. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan Pengamanan Aset daerah ;
4. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah merupakan tenaga pendukung yang pontensial bagi suatu Organisasi dan sebagai salah satu factor penentu keberhasilan Pembangunan. Untuk mendukung tugas dan Fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja berikut data pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 :

Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	ASN	47	5	52
2.	P3K Paruh Waktu	17	9	26
	Total	64	14	78

Dalam Pelaksanaan tugas dan Fungsi Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung SPM, penegakan Perda dan Perkada yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk masih bisa dikatakan belum memadai. Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan renstra reviu 2024 - 2026 belum bayak yang dipenuhi namun pada renstra 2025-2029 terkait dengan Sarana dan Prasana, terus berupaya melalui usulan program dan kegiatan yang dialokasikan pendanaan melalui APBD. Adapun Sarana Prasarana yang mendukung kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

4. Sarana dan prasarana pendukung sampai dengan Desember 2025

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	*2*	*3*	*4*	*5*
A	**Gedung Kantor**			
1.	Ruang Kerja Pimpinan dan Staf	7	7	
2.	Ruang Pos Jaga	2	3	
3.	Ruang Rapat	1		1
4.	Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan (PPID)	0		
5.	Ruang Penyimpanan Barang dan Gudang	1		1
6.	Ruang Sekretariat PPNS	0		
7.	Ruang Sidang Majelis Kode Etik	0		
8.	Tempat Apel/Upacara	1	1	
9.	Halaman Parkir	2	2	
B	**Kendaraan Operasional Satpol PP**			
1.	Sepeda Motor (trail, R2 Lainnya)	29	29	
2.	Jenis Offroad/Jeep (Pamwal)	1	1	
3.	Mini Bus atau Van (mobil jabatan, operasional)	4	1	3
4.	Truk Kecil (Mobil pick up/patroli)	1		1
5.	Truk Sedang (Hilux, Raisa)	2	2	

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
6.	Truk Besar	0		
7.	Kendaraan Lain (Speedboat)	4	4	
C	**Perlengkapan Operasional**			
I	**Perorangan**			
1.	Pakaian Dinas	0		
2.	Tonfa dan Holster Tonfa (tongkat T)	0		
3.	Borgol	0		
4.	Tameng	0		
5.	Senter	0	15	
6.	Ferplas	0		
7.	Tas atau Ransel	0		
8.	Sleeping Bag	0		
9.	Jaket	0		
10	Rompi/Body Protector	18		
11	Masker	0		
II	**Perlengkapan Beregu**			
1.	Matras	0		
2.	Tenda Pleton	2	2	
3.	Peralatan Kebencanaan (Perahu Karet)	0		
4.	**Peralatan Komunikasi**			
	Handy Talky (HT)	31	31	
	Repeater	1	1	

Sumber Kartu Inventaris Barang

D. ISU - ISU STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Renstra Revieu tahun 2024-2026 adalah : **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda** sedangkan pada renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Adalah " **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat** ". Dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban ada beberapa **isu strategis** yang harus dijalanakan dalam mencapai tujuan Satpol PP yakni :

1. Kesulitan dalam pengawasan dan penegakan Perda dan Perkada terutama dalam konteks otonomi daerah;
2. Mengoptimalkan penggunaan tehnologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan Perda dan Perkada ;
3. Tantangan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tengah-tengah perubahan social dan ekonomi;
4. Membangun kerjasama yang efektif dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
5. Peningkatan kapasitas Satpol PP untuk menghadapi tantangan yang semakin komplek dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
6. Meningkatkan koordinasi dengan instasi lain untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
7. Tantangan Peningkatan Ketentramana dan Ketertiban Umum ditengah-tengah Perubahan social dan ekonomi;
8. Peran Satlinmas tingkat Desa/Kelurahan yang belum optimal

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum/Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

D. Isu-isu Strategis yang Sedang Dihadapi Organisasi

E. Sistematika Penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja

B. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun berkenan (n)

A.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

A.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) dengan standart Nasional (minimal dengan region/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan) berdasarkan RPD 2024 -2026

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional berdasarkan RPJMD 2025-2029

A.5. Analis keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

A.6. Analis atas efisiensi pengunaan Sumber daya

A.7. Analis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pecapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran

1. Perjanjian Kinerja tahun 2025 (Berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar) DPA
4. Bukti Dukung Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/RENCANA KERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, dan kondisi, permasalahan tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2025 didasarkan pada 2 Renstra, yaitu Renstra 2024- 2026 dan Renstra 2025 -2029 .

1. Renstra 2024-2026

Tujuan dan sasaran berdasarkan renstra 2024-2026

1.1 Tujuan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024- 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), maka berdasarkan Instruksi tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk menyusun Restra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dengan tujuan " **Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani** " Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarka pada capaian pengukuran hasil rencana Kerja

Tahunanan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja utama dan kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi perangkat Daerah menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1.1

Interval Nilai Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80 % ≤ 90 %	Tercapai dengan catatan
3	< 80 %	Tidak Tercapai

1.2 Sasaran

Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk merumuskan 2 sasaran :

Sasaran 1 " *Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum* dengan Indikator *Persentase Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani* " yang rumusan perhitungannya adalah

$$\frac{\text{jumlah penanganan gangguan trantibum yang tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} x\ 100\ \%$$

Dengan sasaran ini diharapkan Jumlah Penanganan gangguan Trantibum yang ada di masyarakat dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran 2 " *Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada yang tertangani* " yang rumusan perhitungannya adalah

$$\frac{\text{jumlah penanganan Pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{jumlah pelanggaran perda}} x\ 100\ \%$$

Dengan sasaran ini diharapkan Jumlah Pelanggaran Perda dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun Pengukuran Keberhasilan dalam mencapai 2 sasaran tersebut sebagaimana table berikut ini :

Tabel 1.2

Target Sasaran Kinerja Renstra Reviu 2024-2026

Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Review Restra 2024-2026	Target capaian setiap tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Th 1 2025	Th2 2026	
Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	75	95	100	100
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	75	95	100	100

1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/08/M.PAN/5/2007 tetang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk tahun 2025 berdasarkan Restra Reviu 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Indikator Kinerja Utama

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penaggung jawab
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Persentase penanganan gangguan trantibum yang tertangani	$\frac{Jumlah\ penanganan\ gangguan\ trantibum\ yang\ tertangani}{jumlah\ gangguan\ trantibum} X\ 100\ \%$	Bidang Operasional dan Linmas	Satpol PP
	Pelanggaran Perda yang tertangani	$\frac{Jumlah\ penanganan\ pelanggaran\ perda\ yang\ tertangani}{jumlah\ pelanggaran\ perda} X\ 100\ \%$	Bidang Penegakan Perda	Satpol PP

1.4 Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024- 2026

Rencana Kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 . Berikut Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025

Tabel 1.4

Rencana Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026

Tujuan	Indikator	Indikator Kinerja		Satuan		Target
		Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda					

Tujuan	Indikator	Indikator Kinerja		Satuan		Target
		Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	
		Meningkatnya penangan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Kegiatan	%	95
		Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	Kegiatan	%	95

B. PERJANJIAN KINERJA 2024 - 2026

1. Perjanjian Kinerja berdasarkan renstra 2024-2026

Tabel 1.1

Perjanjian Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	95 %
2	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	95 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.243.063.250	APBD 2025
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.862.549.560	APBD 2025

Renstra 2025-2029

1. Ikhtisar/ringkasan Renstra/Renja

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan sumber daya yang dimiliki daerah. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2025-2029 . Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola Pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan pada masa jabatannya.

VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diiinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk , berdasarkan visi dan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 maka ditentukan VISI periode 2025-2029 adalah :

" **Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju Sejahtera dan bermartabat** "

MISI

Misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban ;
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,partisipatif dan transparan;
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur public yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas, pelayanan,mutu pendidikan dan kesehatan untuk mnghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local ;
6. Meningkatkan pembangunan sector pariwisata serta sector produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;
7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, budaya dan kearifan local;

Untuk melaksanakan Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 dimana Satuan Polisi Pamong Praja masuk pada misi 1 (satu) yaitu : "*Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan Ketertiban* " Perumusan dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran misi kesatu . Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk untuk mendukung RPJMD tahun 2025 2029 dalam renstra perangkat daerah adalah :

" **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum serta pelindungan masyarakat** " dengan Indikator " Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPPKU) dan Nilai Indeks Satlinmas "

Rentang Nilai Indek IPKKU

Rentang Nilai	Kategori
0,00 - 20,00	Buruk
20,01 - 40,00	Kurang Baik
40,01 - 60,00	Cukup baik
60,01 - 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik

Tabel 1.2

Indikator	Formulasi Penghitungan	Baseline	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode renstra
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	$Indeks\ PPKU = \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{i}\ X\ Skor\ dimensi^{i}$	61	61	65	69	73	77	80
Nilai Indeks Satlinmas	$Indeks\ Satlinmas = \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{i}\ X\ Skor\ dimensi^{i}$	61	61	65	69	73	77	80

2. Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2029

Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran misi ke satu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah : " Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat "

Sasaran

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk ada 2 sasaran

1. Meningkatnya penanganan gangguan trantibum Indikator " Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan "
2. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada
   Indikator " Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan "
   Sebagaimana table berikut ini

Tabel 1.2

Sasaran KInerja Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target /Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode restra
			2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	85 %	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85 %	100	100	100	100	100	100

b. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah, Indikator Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana berikut ini :

Tabel 1.3

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan	Sumber data	Penagung jawab
Meningkatnya Ketentraman dan Keterrtiban Umum serta pelindungan masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	$Indeks\ PPKU = \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{\,i}\ X\ Skor\ dimensi^{\,i}$	Satpol PP	Satpol PP
	Nilai Indeks Satlinmas	$Indeks\ Satlinmas = \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{\,i}\ X\ Skor\ dimensi^{\,i}$	Satpol PP	Satpol PP

C. PERJANJIAN KINERJA 2025 - 2029

Perjanjian Kinerja Restra 2025 -2029 sebagaimana table berikut :

Tabel 1.4

Perjanjian Kinerja Berdasarkan Renstra 2025 -2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nilai Indeks PKKU	61
		Nilai Indeks Satlinmas	61

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.276.068.350,-	APBD 2025
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.158.908.710,-	APBD 2025

Namun dengan berjalanya waktu dalam anggaran tahun 2025 ada beberapa aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan Inpres No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindak lanjuti dengan instruksi Bupati nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan perubahan anggaran tahun 2025 dengan rincian Anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.5

Penyesuain APBD dan P-APBD Tahun 2025

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH		
							SEBELUM (Pagu Raperda APBD 2025)	SESUDAH (Pagu penyesuaian surat DJPK)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1						2	3	4	5= 4 - 3
							11.530.478.020	**10.492.181.425**	**- 1.038.296.595**
1	**05**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**9.489.200.618**	**8.762.131.825**	**- 727.068.793**
1	**05**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24.337.000**	**11.597.000**	**- 12.740.000**
1	05	01	2	01	0001	Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.745.000	4.312.000	- 4.433.000
1	05	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD	2.928.000	1.447.000	- 1.481.000
1	05	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD	2.556.000	1.238.000	- 1.318.000
1	05	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5.800.000	2.500.000	- 3.300.000
1	05	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.308.000	2.100.000	- 2.208.000
1	**05**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.997.430.000**	**7.993.470.000**	**- 3.960.000**
1	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.989.298.000	7.989.298.000	-

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH		
							SEBELUM (Pagu Raperda APBD 2025)	SESUDAH (Pagu penyesuaian surat DJPK)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1						2	3	4	5= 4 - 3
1	05	01	2	02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.020.000	2.016.000	- 2.004.000
1	05	01	2	02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.112.000	2.156.000	- 1.956.000
	05	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**109.668.000**	-	- 109.668.000
1	05	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	109.668.000	-	- 109.668.000
1	**05**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**400.866.300**	**168.596.575**	**- 232.269.725**
1	05	01	2	06	0001	Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.181.200	3.001.300	- 4.179.900
1	05	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.779.900	49.022.500	- 83.757.400
1	05	01	2	06	0005	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	9.077.200	4.680.000	- 4.397.200
1	05	01	2	06	0006	Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan	2.400.000	2.400.000	-
1	05	01	2	06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.276.500	6.031.375	- 18.245.125
1	05	01	2	06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	216.883.000	100.460.000	- 116.423.000
1	05	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.268.500	3.001.400	- 5.267.100
1	**05**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**165.810.968**	-	**- 165.810.968**
1	05	01	2	07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
1	05	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	87.196.620	-	- 87.196.620
1	05	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.614.348	-	- 78.614.348

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH		
							SEBELUM (Pagu Raperda APBD 2025)	SESUDAH (Pagu penyesuaian surat DJPK)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1						2	3	4	5= 4 - 3
1	**05**	**01**	**2**	**08**		**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**267.539.750**	**172.867.000**	**- 94.672.750**
1	05	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.003.750	1.500.000	- 1.503.750
1	05	01	2	08	0002	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	65.500.000	62.225.000	- 3.275.000
1	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199.036.000	109.142.000	- 89.894.000
1	**05**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**523.548.600**	**415.601.250**	**- 107.947.350**
1	05	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.637.400	72.052.400	- 9.585.000
1	05	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.939.800	303.946.000	- 59.993.800
1	05	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.971.400	39.602.850	- 38.368.550
1	05	01	2	09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
1	**05**	**01**	**2**	**02**		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**2.041.277.402**	**1.730.049.600**	**- 311.227.802**
1	**05**	**01**	**2**	**2**	**01**	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten**	**1.896.160.152**	**1.679.978.400**	**- 216.181.752**
1	05	01	2	01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.591.100	2.795.600	- 2.795.500
1	05	01	2	01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	66.271.300	15.000.000	- 51.271.300

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH		
							SEBELUM (Pagu Raperda APBD 2025)	SESUDAH (Pagu penyesuaian surat DJPK)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1						2	3	4	5= 4 - 3
1	05	01	2	01	0006	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	961.116.100	1.065.483.800	104.367.700
1	05	01	2	01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3.500.000	1.750.000	- 1.750.000
1	05	01	2	01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	-	-	-
1	05	01	2	01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui UJI kompetensi untuk usulan perpindaha Jabatan Fungsional Pol PP, Promosi dan Kenaiakn Jenjang Jabatan	14.460.000	7.230.000	- 7.230.000
1	05	01	2	01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	-
1	05	01	2	01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-	-	-
1	05	01	2	01	0015	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	663.467.800	566.719.000	- 96.748.800
1	05	01	2	01	0016	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	88.020.600	20.000.000	- 68.020.600

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH		
							SEBELUM (Pagu Raperda APBD 2025)	SESUDAH (Pagu penyesuaian surat DJPK)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1						2	3	4	5= 4 - 3
1	05	01	2	01	0017	Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.500.000	1.000.000	- 1.500.000
1	05	01	2	01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	91.233.252	-	- 91.233.252
1	**05**	**01**	**2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**145.117.250**	**50.071.200**	**- 95.046.050**
1	05	01	2	02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggara Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.776.000	2.530.000	- 3.246.000
1	05	01	2	02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.000.000	5.000.000	- 7.000.000
1	05	01	2	02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	14.599.700	-	- 14.599.700
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	3.126.150	-	- 3.126.150
1	05	01	2	02	0010	Sosialiasasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	48.533.000	12.000.000	- 36.533.000
1	05	01	2	02	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.000.000	15.000.000	- 15.000.000
1	05	01	2	02	0012	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	31.082.400	15.541.200	- 15.541.200
1	05	01	2	**03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	-	-	-
1	05	01	2	03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	-	-	-

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH		
							SEBELUM (Pagu Raperda APBD 2025)	SESUDAH (Pagu penyesuaian surat DJPK)	BERTAMBAH/ BERKURANG
1						2	3	4	5= 4 - 3
1	05	01	2	03	0003	Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-
1	05	01	2	03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	-	-	-
1	05	01	2	03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	-	-	-
1	05	01	2	03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insntansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 disajikan Capain Kinerja Restra Revieu 2024- 2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Interval Nilai Sasaran strategis OPD

No	Interval Nilai Capaian	Kreteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90 %	Tercapai dengan catatan
3	< 80 %	Tidak Tercapai

Kriteria Penilaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Rentang Nilai	Kategori
0,00 - 20,00	Buruk
20,01 - 40,00	Kurang Baik
40,01 - 60,00	Cukup baik
60,01 - 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik

A.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berkenaan tahun 2025 terdapat 2 Pengitungan sasaran Kinerja yaitu sasaran kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana table berikut ini : (n) atau tahun 2025

3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Tujuan: Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan Penegakan Perda	Renstra 2024-2026	95	81	85 %
2	Sasaran Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Renstra 2024-2026	95	75	78 %
	Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra 2024-2026	95	87	91 %
3	Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Renstra 2025-2029	61	68	111
		Nilai Indeks Satlinmas	Renstra 2025-2029	61	64	104

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
4	Sasaran : Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Renstra 2025-2029	100	100	100 %
	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Renstra 2025-2029	100	100	100 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan skala pengukuran kinerja dapat dianalisa sbb :

Analisa Pencapaian Tujuan 2024-2026

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda dengan Indikator Persentase meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan Penegakan Perda diukur berdasarkan akumulasi penghitungan hasil dari masing- masing Indikator Sasaran dibagi 2 (dua)

Analisis Pencapaian Sasaran

1. **Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum** diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani "
   - Target Kegiatan Tahun 2025 (500)
   - Realisasi Kegiatan sampai dengan bulan September 2025 (375)
   - Capaian Kinerja Menggunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum yang tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} X\ 100\ \%$$

$$\frac{375}{500}\ x\ 100\ \% =$$

2. Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani

diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani

- Target Kegiatan Tahun 2025 (226)
- Realisasi Kegiatan sampai dengan bulan September 2025 (197)
- Capaian Kinerja Mengunakan Rumus

$$\frac{\text{jumlah penanganan penegakan perda yang tertangani}}{\text{jumlah penegakan perda}} X\ 100\ \%$$

$$\frac{197}{226}\ x\ 100\ \% = 87\ \%$$

Analisa Pencapaian Tujuan Renstra 2025-2029

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, dengan Indikator Nilai Indeks Penyelenggaraan Keentramanan dan Ketertiban Umum (IPKKU) untuk Penghitungan dilaksanakan penghitungan mandiri OPD sesuai dengan Evidence dari masing masing Indikator yang ada dalam Penyelenggaraan urusan Trantibum, tahun 2025

ditargetkan 61 terealisasi 68 Capaian Kinerja 111 dengan Formulasi Penghitungan

Rumus Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

$$Indeks\ PPKU \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{\,i}\ x\ Skor\ Dimensi^{\,i}$$

Tabel 3.1.1.1 Hasil Penghitungan IPKKU Mandiri

No	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai
1	Dimensi Starategi	12,07
2	Dimensi sumber daya manusia	24,05
3	Dimensi Sistem	31,02
	Total Nilai Indeks PKKU	67,77

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dan Indikator ini menjadi indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum diukur berdasarkan 3 dimensi, 7 subdemensi, dan 38 indikator

Sebagai berikut :

Dimensi

1. Strategi (0,19)
2. SDM (0,49)
3. Sistem (0,31)

Sub Dimensi Strategi

1. Penegakan perda (0,333)

7 Indikator

1. Adanya proses pemetaan wilayah rawan pelanggaran perda/perkada (0,1398)
2. Adanya SOP penegakan perda dan perkada untuk satpol pp (0,1490)
3. Adanya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat di wilayah raawan pelanggaran (0,1442)
4. Adanya data yang menunjukkan tindakan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran perda/perkada yang dilakukan oleh satpol pp (0,1439)
5. Adanya data yang menunjukkan tindakan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran perda/perkada yang dilakukan oleh satpol pp (0,1349)
6. Adanya data yang menunjukkan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran perda/perkada yang dilakukan oleh satpol pp (0,1369)
7. Adanya data yang menunjukkan kegiatan penindakan secara administratip terhadap pelanggaran perda/perkada yang dilakukan oleh satpol pp (0,1424)

2. Penyelenggaraan trantibum (0,667)

10 Indikator

1. Adanya proses wilayah rawan pelanggaran tribumtranmas (0,0968)
2. Adanya SOP penyelenggaraan Tribumtranmas untuk satpol pp (0,1017)
3. Adanya sosialisasi Tribumtranmas kepada masyarakat (diutamankan di wilayah rawan pelanggaran) (0,0988)
4. Adanya program deteksi dini dan cegah dini gangguan trantibum di daerah (0,0970)
5. Adanya program kegiatan pembinaan dan penyuluhan masyarakat terkait tribumtranmas di daerah (0,0975)
6. Adanya program kegiatan patrol dalam penceagahan dalam gangguan tribumtranmas di daerah (0,097)
7. Adanya program kegiatan pengamanan asset,lokasi kunjungan orang penting (pejabat pusat/daerah) dan kegiatan penting (0,1026)
8. Adanya program kegiatan pengawalan orang penting (Pusat/daerah) (0,1011)
9. Adanya program kegiatan penertiban dalam mencagah terjadinya gangguan trantibum di daerah (0,1041)
10. Adanya program kegiatan penanganan unjuk rasa/kerusuhan dalam mencegah terjadinya trantibum di daerah (0,1031)

Dimensi SDM

1. Pemberdayaan SDM (0,5)

4 Indikator

1. Adanya dokumen hasil penghitungan kebutuhan formasi jabatan struktural dan fungsional (0,2531)
2. adanya dokumen penyusunan analisis jabatan pada setiap unit kerja pada jabatan struktural dan fungsional (0,2539)
3. adanya dokumen hasil penyusunan analisis beban kerja pada setiap unit kerja pada jabatan structural dan fungsional (0,2497)
4. adanya dokumen hasil penyusunan standart kompetensi jabatan (0,2433)

2. Peningkatan kapasitas (0,5)

3 Indikator

1. adanya dokumen hasil perencanaan peningkatan kapasitas SDM satpol pp (0,3349)
2. adanya program peningkatan kompetensi SDM satpol pp (0,3363)
3. adanya program dan kegiatan peningkatan kapasitas PPNS pada satpol pp (0,3288)

Dimensi Sistem

1. Sarana prasarana (0,25)

4 Indikator

1. adanya dokumen identifikasi sarana dan prasarana pendukung satpol pp (0,2529)
2. adanya realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja satpol pp (0,2412)
3. adanya dokumen inventarisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja satpol pp (0,2540)
4. adanya dokumen pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung kinerja satpol pp (0,2519)

2. Perencanaan dan anggaran (0,5)

6 Indikator

1. adanya program tribumtranmas yang tertuang di dalam RPJMD (0,2516)
2. adanya rencana kerja tahunan penyelenggaraan tribumtranmas (0,2534)
3. adanya kode rekening program kegiatan tribumtranmas dalam klasifikasi,kodefikasi serta nomer klatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (0,2457)
4. adanya dokumen rencana kerja tribumtranmas tahunan yang sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Program/kegiatan sarana dan prasarana monitoring evaluasi dll (0,2493)

3. Akuntabilitas (0,25)

7 Indikator

1. adanya instrument preriodik (bulanan/tribulan/semester) monitoring pelaksanaan program kegiatan satpol pp yang sesuai dengan dokumen (0,1452)
2. adanya kegiatan monitoring pelaksanaan program kegiatan satpol pp di daerah secara periodic (tribulan/semester) sesuai dengan dokumen (0,1434)

3. adanya mekanisme pembelian reward dan panismen dari pimpinan kepada anggota satpol pp berdasarkan hasil monitoring evaluasi secara periodic (tribulan/semesteran/tahunan) (0,1288)
4. adanya system layanan aduan masyarakat terkait kinerja satpol pp/penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah yang mudah di akses masyarakat (kotak aduan,website,nomer aduan,dll) (0,1463)
5. adanya Instrumen evaluasi tahunan pelaksanaan program –kegiatan Satpol PP di daerah (0,1452)
6. adanya kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan program kegiatan Satpol PP di daerah (0,1469)
7. adanya kegiatan pembahasan hasil evaluasi monitoring pelaksanaan Satpol PP di daerah (internal-ekternal pemerintah daerah) (0,1442)

Nilai Indeks Satlinmas dengan Pengukuran Mandiri sesuai dengan evidence

Tabel 3.1.1.1.1 Hasil Penghitungan Indeks Satlinmas Mandiri

No	Indeks Satlinmas	Nilai
1	Dimensi Starategi	9,24
2	Dimensi sumber daya manusia	54,35
3	Dimensi Sistem	0
	Total Nilai Indeks PKKU	63,59

Rumus Nilai Indeks Satlinmas

$$Indeks\ Satlinmas \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{\,i} \ x\ Skor\ Dimensi^{\,i}$$

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah terkait dengan Indeks Satlinmas diperlukan pengukuran dengan kreteria demensi, sub demensi, indicator

Dimensi

1. Strategi
2. Sumber daya
3. System

Sub Demensi

1. Pelaksanaan fungsi satlinmas (0,096)

3 Indikator

1. Adanya program kegiatan pelibatan Satlinmas dalam Upaya deteksi dini dalam menghadapi potensi rawan gangguan trantibumlinmas (0,3326)
2. Adanya program kegiatan pelibatan Satlinmas dalam kegiatan Patroli /pengawalan/pengamanan (0,3337)
3. Adanya data yang menunjukkan keterlibatan anggota Satlinmas dalam setiap penanganan gangguan Trantibumlinmas (0,3337)

2. Kebijakan (0,024)

3 Indikator

1. Adanya SK Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Satlinmas (0,2615)
2. Adanya visi dan Misi RPJMD yang mengarah pada Fungsi Satlinmas (0,2471)
3. Adanya Kebijakan pedoman penyelenggaraan Satlinmas dalam bentuk regulasi SOP /Juknis/Juklak yang dibuat pemerintah daerah (Pemda Kabupaten/Kota) (0,2511)
4. Adanya instrumen periodik (bulanan/triwulan/semesteran) monitoring pelaksanaan program kegiatan SATLINMAS Kab/Kota (0,2402)

3. Inovasi peningkatan kapasitas (0,608)

2 Indikator

1. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi anggota satlinmas di kabupaten/kota (0,48106)
2. Adanya pemberian reward (penghargaan) kepada anggota satlinmas yang berprestasi (0,51894)

4. Pemberdayaan (0,204)

2 Indikator

1. Adanya data pokok jumlah anggota satlinmas kabupaten/kota (0,48852)
2. Adanya data pokok jumlah anggota satlinmas desa/kelurahan (0,51148)

5. Sarana prasarana (0,668)

2 Indikator

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana dalam penanganan gangguan tibumtranmas, bencana kebakaran yang dimanfaatkan oleh Satlinmas (baik dalam bentuk pengadaan, hibah/bantuan/sewa/pinjam pakai dan instansi terkait) (0,50817)
2. Adanya bantuan /hibah dalam pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana gangguan tibumtranmas, bencana dan kebakaran dari Pemerintah daerah (pemda) Kabupaten/Kota (0,49183)

Analisis Pencapaian Sasaran

- Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum diukur dengan indikator kinerja "Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan "merupakan sasaran pengukuran keberhasilan dalam upaya meningkatkan penanganan gangguan Trantibum . Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2025 target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %, dengan penghitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum yang tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{500}{500} \; x \; 100\,\% = 100\,\%$$

- Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada diukur dengan Indikator Kinerja " Persentaee Perda dan Perkada yang ditegakkan merupakan sasaran pengukuran keberhasilan dalam upaya meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan . Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2025 target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %, dengan penghitungan sbb :

$$\frac{\text{jumlah penanganan penegakan perda yang tertangani}}{\text{jumlah penegakan perda}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{226}{226} \; x \; 100\,\% = 100\,\%$$

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Tahun (2022,2023,2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja Tahun				Realisasi Kinerja Tahun			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
1.	Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan penegakan perda	Renstra 2024-2026	75 %	85 %	85 %	95 %	94 %	99%	99%	81 %
2	Sasaran Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Renstra 2024-2026	75 %	85 %	85 %	95 %	92 %	98%	98%	75 %
3	Meningkat nya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra 2024-2026	75 %	85 %	85 %	95 %	97 %	100%	100%	87 %
4	Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Renstra 2025-2029	-			61 Nilai	-		-	68 Nilai
		Nilai Indeks Satlinmas	Renstra 2025-2029	-			61 Nilai	-		-	64 Nilai
5	Sasaran Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Renstra 2025-2029	-			100%			100%	100%
6	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Renstra 2025-2029	-			100%			100^	100%

Analisa Perhitungan untuk realisasi kinerja Pencapaian Tujuan

Tujuan (Renstra 2024-2026)

Penghitungan untuk Analisa tujuan dihitungan dari Jumlah Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani di tambah Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani dibagi 2 dikalikan 100%

Analisa Perhitungan untuk realisasi kinerja tahun n-3 (tahun 2022) adalah sebagai berikut :

3. **Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum** diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani "

- Target Kegiatan Tahun 2022 (147)
- Realisasi Kegiatan Tahun 2022 (136)
- Capaian Kinerja Menggunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum yang tertangani}}{\text{jumlah pelanggaran trantibum}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{136}{147} \; x \; 100\,\% = 92\,\%$$

4. **Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani**

diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Pelanggaran Perda Yang tertangani

- Target Kegiatan Tahun 2022 (46)
- Realisasi Kegiatan Tahun 2022 (45)
- Capaian Kinerja Mengunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{jumlahi seluruh pelanggaran perda yang tertangani}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{45}{46} \; x \; 100\,\% = 97\,\%$$

Analisa Perhitungan untuk realisasi kinerja tahun n-2 (tahun 2023) adalah sebagai berikut :

5. **Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum** diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani "

- Target Kegiatan Tahun 2023 (310)
- Realisasi Kegiatan Tahun 2023 (305)
- Capaian Kinerja Menggunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum yang tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantibum i}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{305}{310} \; x \; 100\,\% = 98\,\%$$

6. **Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani**

diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Pelanggaran Perda Yang tertangani

- Target Kegiatan Tahun 2023(286)
- Realisasi Kegiatan Tahun 2023 (286)
- Capaian Kinerja Mengunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh pelanggaran perda yang tertangani}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{286}{286} \; x \; 100\,\% = 100\,\%$$

Analisa Perhitungan untuk realisasi kinerja tahun n-1 (tahun 2024) adalah sebagai berikut :

Analisa Pencapaian Tujuan

Penghitungan untuk Analisa tujuan dihitungan dari Jumlah Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani di tambah Jumlah Pelanggaran Perda yang Tertangani dibagi 2 dikalikan 100%

Perhitungan sasaran Kinerja

1. **Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum** diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani "

- Target Kegiatan Tahun 2024 (330)
- Realisasi Kegiatan Tahun 2024 (325)
- Capaian Kinerja Menggunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} x\ 100\ \%$$

$$\frac{325}{330} x\ 100\ \% = 100\ \%$$

2 **Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani**

diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Pelanggaran Perda Yang tertangani

- Target Kegiatan Tahun 2024 (89)
- Realisasi Kegiatan Tahun 2024 (89)
- Capaian Kinerja Mengunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh pelanggaran perda yang tertangani}} x\ 100\ \%$$

$$\frac{89}{89} x\ 100\ \% = 100\ \%$$

Analisa Penghitungan untuk realisasi kinerja tahun N (Tahun 2025)

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 2025 ada dua dokumen perencanaan daerah yang berlaku dan dilaksanakan yaitu rencana Strategis/ Renstra 2024- 2026 dengan sasaran Kinerja

7. **Meningkatnya Penanganan gangguan Trantibum** diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani "

- Target Kegiatan Tahun 2025 (500)
- Realisasi Kegiatan sampai dengan bulan September 2025 (375)
- Capaian Kinerja Menggunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum tertangani}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{500}{500} \; x \; 100\,\% = 100\,\%$$

8. **Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani**

diukur dengan Indikator Kinerja " Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani

- Target Kegiatan Tahun 2025 (226)
- Realisasi Kegiatan sampai dengan bulan September 2025 (197)
- Capaian Kinerja Mengunakan Rumus

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh pelanggaran perda yang tertangani}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{197}{226} \; x \; 100\,\% = 87\,\%$$

Analisa Penghitungan Pencapaian Tujuan

Restra 2025-2029 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pelindungan masyarakat dengan Indikator Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) dan Nilai Indeks Satlinmas Capain Kinerja Tujuan pada Resntra Perangkat Daerah 2025-2029 adalah sbb :

1 Indesk IPKKU

2 Indeks Satlinmas

Yang dihitungkan dari Pengumpulan Evidence oleh Perangkat Daerah secara mandiri sebagaimana berikut dibawah ini :

a. Rumus Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

$$Indeks\ PPKU \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{i} \ x\ Skor\ Dimensi^{i}$$

Hasil Penghitungan IPKKU Mandiri

No	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai
1	Dimensi Starategi	12,07
2	Dimensi sumber daya manusia	24,05
3	Dimensi Sistem	31,02
	Total Nilai Indeks PKKU	**67,77**

b. Rumus Nilai Indeks Satlinmas

$$Indeks\ Satlinmas \sum_{i=1}^{n} Bobot\ Dimensi^{i} \ x\ Skor\ Dimensi^{i}$$

Hasil Penghitungan Indeks Satlinmas Mandiri

No	Indeks Satlinmas	Nilai
1	Dimensi Starategi	9,24
2	Dimensi sumber daya manusia	54,35
3	Dimensi Sistem	0
	Total Nilai Indeks Satlinmas	**63,59**

9. Analisa Penghitungan Capaian Sasaran

Pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ada 2 capaian sasaran yaitu :

- Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum diukur dengan indikator kinerja "Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan "merupakan sasaran pengukuran keberhasilan dalam upaya meningkatkan penanganan gangguan Trantibum . Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2025 target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %, dengan penghitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{500}{500} \; x \; 100\,\% = 100\,\%$$

- Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada diukur dengan Indikator Kinerja " Persentaee Perda dan Perkada yang ditegakkan merupakan sasaran pengukuran keberhasilan dalam upaya meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan . Capaian Kinerja Sasaran pada tahun 2025 target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %, dengan penghitungan sbb :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\text{jumlah gangguan trantibum}} \; x \; 100\,\%$$

$$\frac{226}{226} \; x \; 100\,\% = 100\,\%$$

Berdasarkan skala pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis, untuk capaian tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 nilai kinerja Satuan Polisi secara umum **"BAIK"** dalam "Meningkatnya penanganan gangguan trantibum dan Penegakan Perda di Kabupaten Nganjuk". Artinya Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik- baiknya. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari stakeholder secara keseluruhan untuk melaksanakan Gangguan Trantibum di Kabupaten Nganjuk.

Realisasi kinerja dari indikator sasaran persentase meningkatnya penanganan gangguan trantibum dan Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada mengalami peningkatan . Hal ini dipengaruhi beberapa factor, diantaranya adalah :

1. Adanya Kerja sama antar lembaga untuk menegakan Trantibum
2. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah
3. Dukungan dari Stokholder dalam Pelaksanaan Trantibum
4. Diambilnya tindakan tegas para pelanggar Perda
5. Peningkatan SDM Satpol PP
6. Peningkatan Sarana dan Prasara Operasi Penegakan Peda dan Perkada
7. Pelayanan Pelaporan secara online yang berbasis kinerja
8. Adanya Kesadaran Masyarakat untuk patuh terhadap Perda dan Perkada
9. Peran Pemeintah Daerah untuk menampung Hasil Razia gangguan Trantibum
10. Terbentuk nya Linmas Desa 1 Pleton 1 Desa

A.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 :

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra (berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Renstra tahun 2025					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Renstra Reviu 2024-2026	85	95	100			
2	Sasaran Strategis Meningkat nya penangan an gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Renstra Reviu 2024-2026	85	95	100			
	Meningkat nya Penegakan Perda yang	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra Reviu 2024-2026	85	95	100			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Renstra tahun 2025					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
3	Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nilai IndeksPenyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Renstra 2025-2029		61	65	69	73	77
		Nilai Indeks Satlinmas	Renstra 2025-2029		61	65	69	73	77
4	Sasaran strategis Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Renstra 2025-2029		100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Renstra 2025-2029		100	100	100	100	100

Dari table tersebut diatas dapat dianalisa bahwa untuk tujuan dan Sasaran Pada restra 2024-2026 pada masing masing sasaran telah tercapai pada renstra 2024-2026 di targetkan masing masing sasaran

95 % realisasi untuk tujuan "Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda" 81 % Capaian Kinerja 85 %, untuk sasaran 1 (satu) sampai dengan bulan September 2025 adalah 75 % capaian Kinerja 78 %, sasaran 2 (dua) sampai dengan bulan September 87 % capaian Kinerja 91 %

Sedangkan pada renstra 2025-2029 untuk Indikator tujuan Nilai Indeks IPKKU dan Nilai Indeks Satlinmas telah dilakukan penilaian mandiri sesuai dengan indicator sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4-3-669 tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana rumus yang telah dijelaskan di atas, sedangkan untuk sasaran

10. Meningkatnya penanganan gangguan trantibum dengan Indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan pada ditargetkan 100 % terealisasi 100 %
11. Meningkatnya Pengakan Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan ditargetkan 100% terealisasi 100 %

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Akhir Renstra

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Dokumen	Target Tahun Akhir Resntra (2026)	Realisasi Kinerja kinerja tahun (n)	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan Meningkstnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan Penegakan Perda	Renstra 2024-2026	100	81	19 %
2	Sasaran strategis Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Renstra 2024-2026	100	75	25 %
	Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra 2024-2026	100	87	13 %
1.	Tujuan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Renstra 2025-2029	80	68	12%
		Nilai Indeks satlinmas	Renstra 2025- 2029	80	64	16 %
2.	Sasaran Meningkat nya penangan an gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Renstra 2025-2029	100	100	1 %
	Meningkat nya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Renstra 2025-2029	100	100	1 %

Dari table tersebut dapat dianalisa bahwa untuk tujuan dan sasaran pada target akhir renstra capaian tingkat kemajuan untuk masing- masing renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 dan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dikarenaka adaya :

1. Adanya Kerja sama antar lembaga untuk menegakan Trantibum
2. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah
3. Dukungan dari Stokholder dalam Pelaksanaan Trantibum
4. Diambilnya tindakan tegas para pelanggar Perda
5. Peningkatan SDM Satpol PP

6. Peningkatan Sarana dan Prasara Operasi Penegakan Peda dan Perkada
7. Pelayanan Pelaporan secara online yang berbasis kinerja
8. Adanya Kesadaran Masyarakat untuk patuh terhadap Perda dan Perkada
9. Peran Pemeintah Daerah untuk menampung Hasil Razia gangguan Trantibum
10. Terbentuk nya Linmas Desa 1 Pleton 1 Desa
11. SPM Trantibum Linmas

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standart Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

(berdasarkan RPD 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	ndikator Kinerja	Standar Nasional/Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	**Sasaran** Terwujudnya ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur	Persenatase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Pol PP Provinsi Jawa Timur	86,21 %	
	Sasaran Penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	Kab Nganjuk	75 %	Dibawah Provinsi

Perbandingan Kinerja Sasaran RPD 2024-2026 dapat dijelaskan sbb: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan sasaran Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur dengan Indikator Kinerja Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum realisasi 82,61 % sedangkan Kabupaten Nganjuk dengan Sasaran Penanganan gangguan trantibum Indikator Persentase Penanganan gangguan Trantibum terealisasi 75 %, Realisasi kinerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur posisi Kinerja ada dibawah Satpol PP Provinsi Jawa Timur, dikarenakan pada Pengitungan realisasi Kinerja RPD 2024-2026 dihitungkannya sampai dengan bulan September 2025, dan setelah itu penghitungan ada pada sasaran RPD 2026-2029.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

(berdasarkan RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Provinsi	Realisasi Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	**Provinsi** Sasaran Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat,serta pencegahan kebakaran dan penyelamatan di Jawa Timur	Persentase Penganganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	85 %	86,21 %
2	**Kab. Nganjuk** Sasaran Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %
3	**Provinsi** Meningkatnya penyelenggaraan ketentramanan,ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Jawa Timur	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	75 %	91,86 %
4	**Kab . Nganjuk** Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	61	66
		Nilai Indeks Satlinmas	61	64

Perbandingan Kinerja Satpol PP Kabupaten Nganjuk dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur berdasarkan RPD 2026- 2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk Kinerja sasaran

12. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pencegahan kebakaran dan penyelamatan di Jawa Timur dengan Indikator Persentase Penganganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat realisasi 86,21 %, sasaran tersebut diatas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk kami bandingkan dengan Sasaran Penanganan gangguan trantibum, dengan Indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan realisasi 100 %
13. Meningkatnya penyelenggaraan ketentramanan,ketertiban umum dan

pelindungan masyarakat di Jawa Timur dengan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) realisasi 91,86 %, sasaran tersebut kami bandingkan dengan Tujuan renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk dengan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Realisasi Kinerja 68

Dalam Pengisian Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Pusat/Nasional untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota melalui Link yang dibagikan ke Daerah, untuk Isian IPKKU tahun 2025 dengan menyertakan bukti dukung Evidence dari masing-masing indicator penilaian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk termasuk dalam Katagori **" BAIK "** dengan Perincian Penilaian sbb:

No	Indikator Penilaian	Hasil Nilai
1	Penegakan Perda	88,6353
2	Penyelenggaraan Trantibum	92,1570
3	Pemberdayaan SDM	64,8669
4	Peningkatan Kapasitas SDM	60,0000
5	Sarana dan Prasarana	100,000
6	Perencanaan dan Anggaran	100,000
7	Akuntabilitas	73,9466
8	Strategi	90,9843
9	SDM	64,2180
10	Sistem	93,4866
	Nilai IPKKU	77,751 (BAIK)

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan/penerus Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	ndikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisa si 2025	Capaian	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Tujuan** Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Restra 2024-2026	95	81 %	85%	**Pendukung** Adanya dukung an Anggara n Adaya Kerjasa ma antar lembaga dalam Penanga nan Trantib um Adanya Kesadar an Masyara kat untuk mematu hi Perda dan Perkada	Akan diusah akan untuk penam bahan anggar an trantib um ditahun tahun yang akan dang Pember ian Sosialis asi Perda dan Perkad a di masyar akat (daerah rawan ganggu an trantib um) Telah dilakuk an rekrut men tenaga orsosin g keama nan Untuk mendu kung SDM Satpol PP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif Solusi
1	**2**	3	4	5	6	7	**8**	9
2	**Sasaran** Meningkatnya Penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum	Renstra 2024-2026	95 %	75 %	79 %	**Penghambat** Masih rendahnya kesadaran masyara kat untuk mentaati peraturan Lemahnya penegak an hokum dalam penangan gangguan trantibum Kurang nya Sumber daya (personil dan Anggaran Politik Praktis atau Intervensi Kurang nya koordinasi antar Instansi	
3	**Sasaran** Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra 2024-2026	95 %	87 %	91 %		
4	Tujuan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Restra 2025-2029	61	68	111		
		Nilai Indek Satlinmas	Renstra 2025-2029	61	64	95		
4	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Renstra 2025-2029	100%	100%	100%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Faktor Pendukung atau Penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%	100 %	100%		

Dari table tersebut baik kinerja tujuan dan sasaran kinerja tahun n (tahun 2025) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk masuk dalam katarori tercapai . Penyebab keberhasilan dari masing masing sasaran di renstra 2024-2026 dan renstra 2025-2029 adalah , dengan berbagai strategi Pelaksanaan Kegiatan di antaranya:

- Patroli Wilayah dilaksanakan secara acak , tidak menentukan waktu/jam yang pasti sehingga sasaran pelanggar perda bisa optimal (karena biasanya jam jam patroli sudah terdeteksi oleh pelanggar perda)
- Pelaksanaan Razia pelanggaran Perda dilaksanakan mendadak, serta alat komunikasi dikumpulkan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran pelaksanaan kegiatan
- Melakukan Kerjasama dengan dinas samping dan instansi vertikal sesuai dengan gangguan trantibum ataupun penegakan perda yang akan dilaksanakan
- Peningkatan SDM Satpol PP (Penambahan Anggota PPNS Penegak Perda)
- Sebelum Kegiatan razia menugaskan Petugas Caraka untuk mendeteksi daerah sekitar Penertiban
- Optimalisasi kegiatan Trantibum dan Penegakan Perda
- Disusunnya Peta rawan Gangguan trantibum
- Disusunya Peta rawan Pelanggaran Perda

  Disamping ada beberapa strategi untuk pencapaian kinerja, juga terdapat beberapa Kendala /permasalahan yang dihadapi Satpol PP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Trantibum linmas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini Rendahnya kesadaran	Perlu diperbaruinya perda nomor 8 tahun 2013 Kurangnya
		masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada	sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal kesadaran mematuhi peraturan
		Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal	Perlunya penambahan anggota PPNS dan pembentukan sekretariat PPNS
		- Peran Satlinmas tingkat Desa /Kelurahan yang belum optimal - Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab. Nganjuk dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman,penetapan jumlah Polisi Pamong Praja	- Perlu adanya peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas Penambahan Anggota Satpol PP
		- Besarnya aktivitas dan daya tarik investasi memunculkan Permasalahan bidang	- Inventasi yang tidak sesuai dengan tata
		hukum, social dan ekonomi - Bertambahnya ruang publik di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi menganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum	ruang wilayah Patroli wilayah kurang optimal

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi akar Permasalahan tersebut diatas adalah

- Telah disusunya Perda Insisiatif Dewan (dalam Proses Penandatangan oleh Bupati)
- Penambahan kegiatan sosialisasi
- Tahun 2025 telah di berangkatkan PPNS Penegak Perda

- Peningkatan Kapasitas Linmas bekerjasama dengan Kecamatan Satpol PP sebagai Nara Sumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilakukan oleh Kecamatan
- Telah direkrutnya tanaga keamanan dari Pihak III untuk menjaga Aset Pemda , sehingga Anggota Satpol PP bisa dimaksimalkan untuk menangani Penanganan gangguan trantibum dan Penegakan Perda
- Untuk bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan sebelum ditambahnya ruang public, sehingga bisa meminimalir gangguan trantibum setelah ruang public jadi
- Telah dilaksanakan Patroli Wilayah di 20 Kecamatan oleh Anggota.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7
1	**Tujuan** Meningkatnya ketentrman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketrtiban umum dan Penegakan Perda	Renstra 2024-2025	81	59	22
2	**Sasaran** Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tetangani	Renstra 2024-2025	75	59	16
	Meningkatnya Penegakan Perda dan tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra 2024-2025	87	59	28
1	**Tujuan** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Nilai indeks penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (IPPKU) (Indeks)	Renstra 2025-2029	68	86	46
		Nilai indeks satlinmas (indeks)		64		
2	**Sasaran** Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Renstra 2025-2029	100	86	14
	meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Renstra 2025-2029	100	86	14

Dari table tersebut dapat dibuktikan bahwa tingkat Efisiensi sumber daya dilaksanakan dengan :

- Optimalisasi kinerja dengan menggunakan E Katalog Versi 6
- Dipetakannya daerah rawan gangguan trantibum dan Penegakan Perda sehingga kegiatan Patroli Wilayah dapat terfokus pada daerah daerah rawan gangguan trantibum.
- Efisiensi Anggaran

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7

Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	ealisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4	**5**	6	7	8	9
1	**Tujuan** Meningkatnya ketentrman dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketrtiban umum dan Penegakan Perda	Renstra 2024-2026					
				Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Nilai sakip Satpol PP	90	78,50	87
				Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan ,pengangggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu	16 dok	13	81 %
				Kegiatan Kegiatan Adminitrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausaha an sub kegiatan yang disusun secara tepat waktu	73 dok	53	72 %
				Kegiatan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian dinas	86	0	Recufusing

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Adminitrasi umum perangkat daerah	Jumlah Kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah yang tersedia	199	175	87%
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	1	0	Recufusing
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan tepat waktu	7	4	57 %
				Kegiatan Pemleiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	45	37	82 %
2	**Sasaran** Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase penanganan gangguan trantibum yang tertangani	Renstra 2024-2026	**Program** peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	726	572	81 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4	**5**	6	7	8	9
				Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman umum dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	500	375	75 %
	Meningkatnya penegakan perda dan perkada yang tertangani	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani	Renstra 2024-2026	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani	226	197	87 %
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	4	0	0
3	**Tujuan** Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Renstra 2025-2029			61	68	111
		Nilai Indeks Satlinmas				61	64	104
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	90	78,50	87
				Kegiatan Perencanaan penganggara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunya Perencanaan, Penganggara n Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	16	16	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Adminitrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	53	53	100 %
				Kegiatan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan adminitrasi kepegawaian yang akurat	86	0	0
				Kegiatan Adminitrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang layak pakai	199	182	91
				Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang layak Pakai	5	0	0
				Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran yang memadai	7	7	100 %
				Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah yang layak pakai	45	40	88
	Sasaran Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan trantibum yang disclesaikan		**Program** Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diceagah			
					Persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani			
					Persentase pemberdayaan satlinmas			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	500	500	100%
	Sasaran Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		**Kegiatan** Penegakan peraturan daerah Kabupaten/ Kota dan peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	287	287	100%
				Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil PPNS Kabupaten/ Kota	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil yang dilaksanakan	4	0	0

Dari table diatas dapat diuraikan bahwa : **(Renstra 2024-2026)**

A. Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Indikator Capaian Program Nilai SAKIP Satpol PP capaian Kinerja BB Capaian Program tersebut didukung oleh capaian Kinerja Kegiatan.
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan ,pengangggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu dengan target kinerja 16 Dokumen terealisasi 13 dokumen sehingga capaian Kinerja 81 % . Target dan realisasi capaian Kinerja Kegiatan

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Renja	2	1	
2	RKA	2	2	
3	DPA	2	2	
4	ManajemenResiko	2	1	
5	Renstra	1	1	
6	LKJIP	1	1	
7	LKPJ	1	1	
9	LPPD	1	1	
10	Laptri	4	3	
	Jumlah	16 Dokumen	13 Dokumen	81 %

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Jumlah dokumen penatausahaan sub kegiatan yang disusun secara tepat waktu 73 teralisasi 53 dokumen yaitu

- 15 Laporan Keuangan Gaji ASN
- 12 Laporan Bulanan pengeluaran
- 2 laporan semesteran
- 12 Laporan Bulanan Keuangan
- 12 Laporan Bulanan Pronoksis

Sehingga Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah 72 %

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator

Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian dinas Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 untuk Pengadaan Barang ditiadakan, maka sesuai dengan amanat tersebut untuk Pengadaan Pakaian Dinas Tahun 2025 (Recufusing)

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah yang tersediadengatarget199 dokumen terealisasi 175 dokumen sehingga capaian kinerja 87 %
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan. Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 untuk Pengadaan Barang ditiadakan, maka sesuai dengan amanat tersebut untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(Recufusing)

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu dengan target 7 dokumen teralisasi 4 dokumen sehingga capaian kinerja 57 %, Terdiri dari Penyediaan Jasa Surat menyurat , Penyediaan komunikasi sumber daya listrik, dan penyediaan jasa umum kantor, Belanja Jasa Kebersihan Kantor, Iuran jaminan kesehatan ASN, Iuran Jaminan Kecelakaan ASN, Belanja Sewa alat Rumah Tangga
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik ditargetkan 45 unit kendaraan terealisasi 37 unit kendaraan capaian kinerja 82 %

B. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani pada Renstra Revieu 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dengan Program tersebut diatas terdapat 2 sasaran Kinerja

1. Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum dengan Indikator Persentase Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani dalam tahun 2025 ditargetkan 500 gangguan trantibum sampai dengan berjalannya renstra 2024-2026 sampai dengan September 2025, telah realisasi 375 capaian Kinerja 75 %.
2. Meningkatnya penegakan perda dan perkada yang tertangani dengan indicator Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani pada tahun 2025 ditargetkan 226 kegiatan penegakan Perda sampai dengan berjalannya renstra 2024-2026 bulan September 2025, realisasi 197 capaian Kinerja 87 .

Dari table diatas dapat diuraikan bahwa : **(Renstra 2025-2029)**

C. Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Indikator Capaian Program Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah BB Capaian Program tersebut didukung oleh capaian Kinerja Kegiatan

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan ,pengangggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu dengan target kinerja 16 Dokumen terealisasi 16 dokumen sehingga capaian Kinerja 100 % . Target dan realisasi capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Renja	2	2	
2	RKA	2	2	
3	DPA	2	2	
4	Manajemen Resiko	2	2	
5	Renstra	1	1	
6	LKJIP	1	1	
7	LKPJ	1	1	
9	LPPD	1	1	
10	Laptri	4	4	
	Jumlah	16 Dokumen	16 Dokumen	100 %

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

  Indikator Jumlah dokumen penatausahaan sub kegiatan yang disusun secara tepat waktu 40 dokumen yaitu

  - 14 Laporan Keuangan Gaji ASN
  - 12 Laporan Bulanan pengeluaran
  - 2 laporan semesteran
  - 12 Laporan Bulanan Keuangan

  Sehingga Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah 100 %
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian dinas Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 untuk Pengadaan Barang ditiadakan, maka sesuai dengan amanat tersebut untuk Pengadaan Pakaian Dinas Tahun 2025 (Recufusing)
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah yang tersedia dengan target 199 paket terealisasi 182 paket sehingga capaian kinerja 91 %
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan. Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 untuk Pengadaan Barang ditiadakan, maka sesuai dengan amanat tersebut untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Recufusing)

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu dengan target 7 dokumen teralisasi 7 dokumen sehingga capaian kinerja 100 %

  Terdiri dari Penyediaan Jasa Surat menyurat , Penyediaan komunikasi sumber daya listrik, dan penyediaan jasa umum kantor, Belanja Jasa Kebersihan Kantor, Iuran jaminan kesehatan ASN, Iuran Jaminan Kecelakaan ASN, Belanja Sewa alat Rumah Tangga
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik ditargetkan 45 unit kendaraan terealisasi 40 unit kendaraan capaian kinerja 88 %

D. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase gangguan Trantibum yang dapat dicegah, persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani dan Persentase Pemberdayaan Linmas Dari Program tsb diatas terdapat 2 sasaran Kinerja

1. Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum dengan Indikator Persentase Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani dalam tahun 2025 ditargetkan 500 gangguan trantibum sampai dengan berjalanya renstra 2025-2029 bulan Oktober s/d bulan desember realisasi 500 kegiatan sehingga capaian kinerja 100 %.
2. Meningkatnya penegakan perda dan perkada yang tertangani dengan indicator Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani pada tahun 2025 ditargetkan 226 kegiatan penegakan Perda sampai dengan berjalannya renstra 2025-2029 bulan Oktober s/dbulan desember realisasi 226 kegiatan sehingga capaian kinerja 100 %.

Lampiran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Tujuan** Meningkatnya ketentramann dan ketertiban umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan Penegakan Perda	Renstra 2024-2026	95 %	81 %	85	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
2	**Sasaran** Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	Renstra 2024-2026	95 %	75 %	78	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani	Renstra 2024-2026	95 %	87%	91	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP SATPOL PP	Renstra 2024-2026	90	78,50	87	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan ,pengangggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu	Renstra 2024-2026	16	13	81	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Adminitrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan sub kegiatan yang disusun secara tepat waktu	Renstra 2024-2026	73	49	67	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian dinas	Renstra 2024-2026	86	0	0	RECOFUSING
	Kegiatan Adminitrasi Umum perangkat daerah	Jumlah kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Renstra 2024-2026	199	175	86	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Renstra 2024-2026	5	0	0	RECOFUSING
	Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan tepat waktu	Renstra 2024-2026	7	4	71	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Pemliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik	Renstra 2024-2026	45	37	80	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Renstra 2024-2026	95	81	85	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman umum dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /kota	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani	Renstra 2024-2026	95	75	78	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggaran perda yang tertangani	Renstra 2024-2026	95	87	91	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS) Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Renstra 2024-2026	4	0	0	RECOFUSING
3	**Tujuan** Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Renstra 2025-2029	61	68	111	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
		Nilai Indeks Satlinmas (Indeks)		61	64	104	
4	**Sasaran** Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Renstra 2025-2029	100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Renstra 2025-2029	100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten /Kota	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	90	78,50	87	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunya Perencanaan, Penganggaran Evaluasi Kinerja dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	Renstra 2025-2029	16	16	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Adminitrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	Renstra 2025-2029	53	53	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya pengelolaan adminitrasi kepegawaian yang akurat	Renstra 2025-2029	86	0	0	RECOFUSING

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Adminitrasi umum perangkat daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang layak pakai	Renstra 2025-2029	199	182	91	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang layak Pakai	Renstra 2025-2029	5	0	0	RECOFUSING
	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran yang memadai	Renstra 2025-2029	7	7	100 %	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Pemleiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Perawatan Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah yang layak pakai	Renstra 2025-2029	45	40	88	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diceagah	Renstra 2025-2029	787	787	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
		Persentase penindakan gangguan trantibum yang tertangani					
		Persentase pemberdayaan satlinmas					
	Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah Kabupaten /Kota	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Renstra 2025-2029	500	500	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Penegakan peraturan daerah Kabupaten /Kota dan peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Renstra 2025-2029	287	287	100	https://drive.google.com/drive/folders/18N7BfbjMZHMKw7GGS1EK6vHGoD-zKHO9?usp=drive_link
	Kegiatan Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil PPNS Kabupaten /Kota	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil yang dilaksanakan	Renstra 2025-2029	4	0	0	RECOFUSING

Dari table diatas dapat diuraikan bahwa :

E. Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Indikator Capaian Program Nilai SAKIP Satpol PP capaian Kinerja BB Capaian Program tersebut didukung oleh capaian Kinerja Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan ,pengangggaran dan evalausi kinerja perangkat daerah yang disusun secara tepat waktu dengan target kinerja 16 Dokumen terealisasi 16 dokumen sehingga capaian Kinerja 100 % . Target dan realisasi capaian Kinerja Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Renja	2	2	
2	RKA	2	2	
3	DPA	2	2	
4	Manajemen Resiko	2	2	
5	Renstra	1	1	
6	LKJIP	1	1	
7	LKPJ	1	1	
9	LPPD	1	1	
10	Laptri	4	4	
	Jumlah	16 Dokumen	16 Dokumen	100 %

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

  Indikator Jumlah dokumen penatausahaan sub kegiatan yang disusun secara tepat waktu 40 dokumen yaitu

  - 14 Laporan Keuangan Gaji ASN
  - 12 Laporan Bulanan pengeluaran
  - 2 laporan semesteran
  - 12 Laporan Bulanan Keuangan

  Sehingga Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah 100 %

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah pegawai yang difasilitasi pakaian dinas Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 untuk Pengadaan Barang ditiadakan, maka sesuai dengan amanat tersebut untuk Pengadaan Pakaian Dinas Tahun 2025 (Recufusing)
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Indikator Jumlah kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah yang tersedia dengan target 162 paket terealisasi 171 paket sehingga capaian kinerja 105 % Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan. Berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 untuk Pengadaan Barang ditiadakan, maka sesuai dengan amanat tersebut untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Recufusing)
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah Jasa Penunjang Ururan Pemerintah Daerah yang dibayarkan tepat waktu dengan target 5 dokumen teralisasi 11 dokumen sehingga capaian kinerja 454 %Terdiri dari Penyediaan Jasa Surat menyurat , Penyediaan komunikasi sumber daya listrik, dan penyediaan jasa umum kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik ditargetkan 39 unit kendaraan terealisasi 34 unit kendaraan capaian kinerja 87 %

F. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani pada Renstra Revieu 2024-2026 Satuan Polisi Pamong Praja dengan Program tersebut diatas terdapat 2 sasaran Kinerja

1. Meningkatnya penanganan gangguan Trantibum dengan Indikator Persentase Penanganan Gangguan Trantibum yang tertangani dalam tahun 2025 ditargetkan 500 gangguan trantibum sampai dengan berjalannya renstra revieu 2024-2026 sampai dengan September 2025, telah dilaksanakan 375 capaian Kinerja 75 %
2. Meningkatnya penegakan perda dan perkada yang tertangani dengan indicator Persentase pelanggaran perda dan perkada yang tertangani pada tahun 2025 ditargetkan 226 kegiatan penegakan Perda sampai dengan berjalannya renstra revieu 2024-2026 sampai dengan September 2025,telah dilaksanakan 197 capaian Kinerja 87 %

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	***Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat***	**11.553.916.060**	**9.976.706.157**	**1.577.209.903**	**86,35**
2	***Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota***	***8.277.847.710***	***6.820.759.743***	**1.457.087.967**	**82,40**
3	**Perencanaan,Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**18.700.000**	**18.393.400**	**306.600**	**98,36**
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.856.000	8.850.400	5.600	99,94
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	2.928.000	2.863.000	65.000	97,78
6	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.704.000	1.640.000	64.000	96,24
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja Ikhtisar kinerja skpd	2.936.000	2.814.000	122.000	95,84
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.276.000	2.226.000	50.000	97,80
9	**Administraasi Keuangan Perangkat daerah**	**7.127.071.000**	**5.750.608.866**	**1.376.462.134**	**80,69**
10	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	7.118.939.000	5.742.522.866	1.376.416.134	80,67

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir tahun skpd	4.020.000	3.987.000	33.000	99,18
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulan/triwulanan/semesteran skpd	4.112.000	4.099.000	13.000	99,68
13	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	**Recofusing**
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	-	-	-	Recofusing
15	**Adminitrasi Umum Perangkat Daerah**	**344.620.910**	**339.196.760**	**5.424.150**	**98,43**
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	7.182.660	7.056.380	126.280	98,24
17	Penyediaan bahan logistik kantor	92.747.550	91.473.580	1.273.970	98,63
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.359.700	9.359.000	700	99,99
19	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.352.000	48.000	98,00
20	Fasilitas kunjungan Tamu	24.200.500	24.160.000	40.500	99,83
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.510.750	196.775.800	3.734.950	98,14
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.219.750	8.020.000	199.750	97,57
23	**Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	**Recofusing**
24	Pengadaan Kendaranaan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Recofusing
25	Pengadaan Mabel	-	-	-	Recofusing
26	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	Recofusing
27	**Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan**	**205.652.000**	**174.472.360**	**31.179.640**	**84,84**
28	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	-	100,00
29	Penyediaan jasa komonikasi ,sumber daya air dan Listrik	73.000.000	42.456.720	30.543.280	58,16
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.652.000	129.015.640	636.360	99,51
31	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**581.803.800**	**538.088.357**	**43.715.443**	**92,49**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
32	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dinas	83.086.800	80.605.215	2.481.585	97,01
33	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas OperasionAL atau lapangan	419.538.100	379.011.592	40.526.508	90,34
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	79.178.900	78.471.550	707.350	99,11
35	***Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***3.276.068.350***	***3.155.946.414***	**120.121.936**	**96,33**
36	**Penangangan Gangguan Ketrentraman dan Ketertiban Umun dalam satu (1) Daerah Kabupaten/Kota**	**2.301.153.700**	**2.197.790.992**	**103.362.708**	**95,51**
37	Koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	5.591.250	5.514.250	77.000	98,62
38	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	66.271.300	66.085.000	186.300	99,72
39	Kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dan teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan ketentrman dan ketrtiban umum	1.334.490.350	1.303.812.215	30.678.135	97,70
40	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3.500.000	3.199.000	301.000	91,40
41	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	-	-	-	Recofusing
42	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP,Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan	14.460.000	-	14.460.000	0,00

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
43	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	Recofusing
44	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Satpol PP dan Satlinmas	-	-	-	Recofusing
45	Pencegahan Gangguan Ketrentraman dan Ketertiban Umun melalui deteksi dini dan cegah dini,Pembinaan, penyuluhan,Pelak sanaan patroli ,Pengamanan Dan pengawalan	665.900.300	621.490.830	44.409.470	93,33
46	Penindakan Gangguan ketentraaman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	88.611.500	83.391.500	5.220.000	94,11
47	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	2.500.000	-	2.500.000	Recofusing
48	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	119.829.000	114.298.197	5.530.803	95,38
49	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali/Kota**	**974.914.650**	**958.155.422**	**16.759.228**	**98,28**
50	Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5.060.000	5.040.000	20.000	99,60
51	Penyelidikan terdahap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	10.000.000	10.000.000	-	100,00
52	Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daeraqh	-	-	-	Recofusing
53	Pemberkasan adminitrasi penyidik olehj PPNS penegak perda	-	-	-	Recofusing
54	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	332.041.850	318.569.200	13.472.650	95,94
55	Penanganan atas pelanggaran kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali/Kota	588.555.000	585.296.222	3.258.778	99,45

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
56	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Wali/Kota	39.257.800	39.250.000	7.800	99,98
57	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	-	-	-	**Recofusing**
58	Pembentukan sekretariat PPNS	-	-	-	Recofusing
59	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	Recofusing
60	Pembentukan PPNS penegak perda	-	-	-	Recofusing
61	Dukungan operasional sekretariat PPNS	-	-	-	Recofusing
62	Pengembangan kapsitas dan karier PPNS	-	-	-	Recofusing

Sebagaimana table realisasi anggaran tersebut maka capain Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 dapat dijelaskan sebai beikut :

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dianggarkan 8.277.847.710 teralisasi 6.820.759.743 atau sekitar 82,40

Kegiatan

- **Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan 18.700.000 dan terealisasi 18.393.400 atau sekitar 98,36 %**

Sub Kegiatan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.856.000 dan teralisasi sebesar Rp. 8.850.400 atau sekitar 99,94 %

b. Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD sub Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp 2.928.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.863.000 atau sekitar 97,78 %

c. Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1704.000 dan teralisasi sebesar Rp 1.640.000 atau sekitar 96,24 %

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD sub kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 2.936.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.814.000 atau sekitar 95,84 %

e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.276.000 dan teralisasi sebesar Rp. 2.226.000 atau sekitar 97,80

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kegiatan ini dianggarkan 7.127.071.000 dan terealisasi 5.750.608.866 atau sekitar 80,69 %**

- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan Gaji dan Tunjngan ASN Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.118.939.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.742.522.866 atau sekitar 80,67 % (Penyerapan Anggaran Gaji tidak bisa dimaksimalkan dikarenakan beberapa sebab antara lain :

- Tahun 2025 ada pension PNS 3 Orang
- Kekosongan Jabatan 3
- Gaji P3 K Paruh Waktu Dianggarkan 12 bulan terealisasi 7 bulan
- TPP Kinerja kurang dari 100 %

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.020.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.987.000 atau sikitar 99,18 %

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/tribulan/semesteran SKPD kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.112.000 dan teralisasi Rp. 4.099.000 atau sekitar 99,68%

- **Kegiatan**

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (anggaran terucufusing)

- **Sub Kegiatan**

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya (Recufusing)

- **Kegiatan**

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan 344.620.910 terealisasi 339.196.760 atau sekitar 98,43 %

- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.182.660 danteralisasi sebesar Rp. 7.056.380 atau sekitar 98,24 %

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 92.747.550 dan teralisasi sebesar Rp. 91.473.580 atau sekitar 98,63 %

c. Penyediaan barang cetak dan penggandaan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 9.359.700 dan teralisasi sebesar Rp. 9.359.000 atau sekitar 99,99 %

d. Penyediaan bahan bacaan Perundang-undangan sub kegiatan ini Rp. 2.400.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.352.000 atau sekitar 98 %

e. Fasilitasi kunjungan tamu sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 24.200.500 dan terealisasi Rp24.160.000 atau sekitar 99,83 %

f. Penyenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.510.750 dan terealisasi sebesar Rp. 196.775.800 atau sekitar 98,14 %

g. Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.219.750 dan teralisasi Rp. 8.020.000 atau sekitar 97,57 %

- **Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Anggaran terecufusing)**
- **Sub Kegiatan**

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Recufusing)

b. Pengadaan Mebel (Recufusing)

c. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya (Recufusing)

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan ini dianggarkan 205.652.000 teralisasi 174.472.360 atau sekitar 84,84 % (efisiensi pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik)**
- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan jasa surat menyurat sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau sekitar 100 %

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 42.456.720 atau sekitar 58,16 %

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 129.652.000 dan teralisasi Rp. 120.015.640 atau sekitar 99,51 %

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dianggarkan 581.803.800 terealisasi 538.088.357 atau sekitar 92,49 % (efisieansi pada Pembiayaan BBM dan suku cadang Kendaraan dinas)**
- **Sub Kegiatan**

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 83.086.800 dan terealiasi sebesar Rp. 80.605.215 atau sekitar 97,01 %

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 419.538.100 dan terealisasi sebesar Rp. 379.011.592 atau sekitar 90,34 %

c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 79.178.000 dan terealisasi sebesar Rp. 78.471.000 atau sekitar 99,11 %

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dianggarkan 3.276.068.350 teralisasi 3.155.946.414 atau sekitar 96,33 %

- **Kegiatan**

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam

1 (satu) Daerah Kabupaten dianggarkan 2.301.153.700 dan teralisasi 2.197.790.992 atau sekitar 95,51 pada kegiatan ini ada 2 sub kegiatan yang tidak teralisasi diantaranya

1. **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP Promosi dan Kenaikan Jenjang Jabatan**
2. **Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada**

- **Sub Kegiatan**

a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.591.250 dan terealisasi sebesar Rp. 5.514.250 atau sekitar 98,62 %

b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrama dan Ketertiban Umum sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 66.271.300 dan terealisasi sebesar Rp 66.085.000 atau sekita 99,72 %

c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.334.490.350 dan terealisasi sebesar Rp. 1.303.812.215 atau sekitar 97,70 %

d. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.199.000 atau sekitar 91,40 %

e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional (RECUFUSING)

f. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan Perpindahan jabatan ke jabatan Fungsional Pol PP Promosi dan Kenaikan jenjang jabatan 14.460.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0 % (kegiatan ini tidak dapat terlaksana dikarenakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa untuk tahun 2025 ini belum terdapat jadwal kegiatan peningkatan kapasitas.)

g. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat (RECUFUSING)

h. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan SatpolPP dan Satlinmas (RECUFUSING)

i. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 665.900.300 dan terealisasi sebesar Rp. 621.490.830 atau sekitar 93,33 %

j. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp .88.611.500 dan terealisasi sebesar Rp. 83.391.500 atau sekitar 94,11 %

h. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau sekitar 0 % (Sub kegiatan ini tidak teralisasi dikarenakan tidak ada warga Negara yang terdampak akibat hokum penegakan perda)

k. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.119.829.000 dan terealisasi 114.298.197 atau sekitar 95.38 %

- **Kegiatan**

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- **Sub Kegiatan**

a. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.060.000 dan terealisasi 5.040.000 atau sekitar 99,60 %

b. Penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000 dan terealisasi Rp. 10.000.000 atau sekitar 100 %

c. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas pelanggaran Peraturan Daerah (RECUFUSING)

d. Pemberkasan administrasi Penyidik oleh PPNS Penegak Perda (RECUFUSING)

e. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 332.041.850 dan terealisasi sebesar Rp. 318.569.200 atau sekitar 95,94 %

f. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walik Kota sub kegitan ini dianggarkan sebesar Rp. 588.555.000 dan terealisasi sebesar Rp. 585.296.222 atau sekitar 99,45 %

g. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturandaerah dan Peraturan Bupati/Walikota sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.257.800 dan teraliasi sebesar Rp. 39.250.000 atau sekitar 99,98 %

- **Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Kabupaten/Kota**

- Sub Kegiatan

a. Pembentukan Sekretariat PPNS (RECUFUSING)

b. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (RECUFUSING)

c. Pembentukan PPNS Penegak Perda (RECUFUSING)

d. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS (RECUFUSING)

e. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS (RECUFUSING)

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah selaras dengan tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026, dan RPJMD 2025-2029. Secara Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Hasil Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk tahun 2025 sesuai dengan target Pengendalian dan Evaluasi :

1. Restra Revieu 2024-2026 sebagaimana table berikut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun (n)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda	Persentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan PenegakanPerda	95	81	85
Sasaran Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani	95	75	78
Meningkatnya Penegakan Perda yang tertangani	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	95	87	91

2. Restra 2025-2029 sebagaimana table berikut ini

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun (n)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Keteriban Umum serta pelindungan masyarakat	Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)	61	68	111
	Nilai Indeks Satlinmas	61	64	104
Sasaran Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang diselesaikan	100	100	100
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100

Sedangkan untuk realisasi kinerja program dan anggaran

1. Rentra Revieu 2024-2026 (Realisasi sampai dengan Bulan September 2025)

Program	Indikator Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Satpol PP	80	78.50	98	8.408.535.123	4.843.449.281	57,60
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani	95	81	85	3.234.744.350	2.027.588.785	62,68

2. Rentra 2025-2029

Program	Indikator Program	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	80	78.50	98	8.277.847.710	6.820.759.743	82,40
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat dicegah Persentase Penindakan gangguan trantibum yang tertangani Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani Persentase Pemberdayaan Satlinmas	100	100	100	3.276.068.350	3.155.946.414	96,33

4.2 Permasalahan/hambatan dan langkah yang diambil Satpol PP Kabupaten Nganjuk di tahun yang akan datang untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada	Perlu diperbaruinya perda nomor 8 tahun 2013 Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal kesadaran mematuhi peraturan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketugasan dan fungsi PPNS yang belum berjalan optimal	Perlunya penambahan anggota PPNS dan pembentukan sekretariat PPNS
		Peran Satlinmas tingkat Desa /Kelurahan yang belum optimal	Perlu adanya peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas
		Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kab. Nganjuk dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman,penetapan jumlah Polisi Pamong Praja	Penambahan Anggota Satpol PP
		Besarnya aktivitas dan daya tarik investasi memunculkan Permasalahan bidang hukum, social dan ekonomi	Inventasi yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
		Bertambahnya ruang publik di Kabupaten Nganjuk yang berpotensi menganggu Ketentraman dan Ketertiban umum	Patroli wilayah kurang optimal

Langkah –langkah yang diambil untuk mengatasi Permasalahan di tahun yang akan datang

- Telah disusunya Perda Insisiatif Dewan (dalam Proses Penandatangan oleh Bupati)
- Penambahan kegiatan sosialisasi
- Tahun 2025 telah di berangkatkan PPNS Penegak Perda
- Peningkatan Kapasitas Linmas bekerjasama dengan Kecamatan, Satpol PP sebagai Nara Sumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilakukan oleh Kecamatan
- Telah direkrutnya tanaga keamanan dari Pihak III untuk menjaga Aset Pemda , sehingga Anggota Satpol PP bisa dimaksimalkan untuk menangani Penanganan gangguan trantibum dan Penegakan Perda
- Untuk bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan sebelum ditambahnya ruang public, sehingga bisa meminimalir gangguan trantibum setelah ruang public jadi
- Telah dilaksanakan Patroli Wilayah di 20 Kecamatan oleh Anggota.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, kritik dan saran kami jadikan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan laporan sehingga mampu memberikan informasi yang tepat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.